

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.B. Kusuma, 2004, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta.
- Ahmad Sukaradja, 2014, *Piagam Madinah & Undang-Undang Dasar NRI 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat yang Majemuk*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aminuddin Ilmar, 2016, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Bachtiar, 2015, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Catatan Sasana Pustaka Keraton Surakarta, “*Sambutan Enam Bulan Kemerdekaan Indonesia*” di Surat Kabar Merdeka edisi 17 Februari 1946.
- Himpunan Dokumen-Dokumen Usaha Mendirikan Daerah Istimewa Surakarta, 1945, *Pelaporan Panitia Tata Negara Daerah Istimewa Surakarta*, tidak diketahui penerbitnya.
- I Dewa Gede Palguna, 2013, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2014, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Julianto Ibrahim, 2011, *Propinsi Daerah Istimewa Surakarta*, Darmakarta, Yogyakarta.
- King Faisal Sulaiman, 2017, *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya*, Thafamedia, Yogyakarta.
- _____, 2017, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Nusa Media, Bandung.

- Kusno S Utomo dkk, 2013, *Surakarta Bukan Jawa Tengah*, Bangun Bangsa, Yogyakarta.
- Maruarar Siahaan, 2015, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- M. Yamin, 1971, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, jilid I, Siguntang, Jakarta.
- Ni'matul Huda, 2014, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*, Nusa Media, Bandung.
- Purwadi dan Fitri Pusponagoro, 2016, *Paku Buwono XI Pejuang Kemerdekaan Indonesia*, World Tradition and History Council (WTCH), Singapura.
- Roeslan Saleh, 1979, *Penjabaran Pancasila dan UUD'45 Dalam Perundang-Undangan*, Aksara Baru, Jakarta.
- Septi Nur Wijayanti dan Iwan Satriawan, 2009, *Hukum Tata Negara Teori & Prakteknya Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta bekerjasama dengan Divisi Publikasi & Penerbitan LP3M UMY, Yogyakarta.
- Sri Juari Santosa, 2002, *Suara Nurani Keraton Surakarta: Peran Keraton Surakarta dalam Mendukung dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Komunitas Studi Didaktika, Yogyakarta.
- Sri Soemantri Martosoewignjo, 1986, *Hak Menguji Material di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Sujamto, 1988, *Daerah Istimewa Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Sutiyono dkk, 2009, *Daerah Istimewa Surakarta*, Putra Bangsa, Yogyakarta.
- Tanto Lailam, 2017, *Teori & Hukum Perundang-Undangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Wuryaningrat, *Sekedar Uraian tentang Swapradja Surakarta setelah Proklamasi Kemerdekaan*, tidak diketahui penerbit dan tahun terbitnya.

Disertasi

Zairin Harahap, 2018, “Penerapan Asas Persamaan Di Hadapan Hukum (*Equality Before The Law*) Dalam Pembentukan Dan Pengujian Undang-Undang: Kajian Penentuan Pejabat Publik Di Indonesia”, (Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Univeritas Islam Indonesia Yogyakarta).

Tesis

Rio Ramabaskara, 2017, *Pengaturan Hukum Daerah Istimewa Surakarta Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Tesis Pasca Sarjana tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia).

Jurnal

Ajie Ramdan, Problematika *Legal Standing* Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 4 (Desember 2014).

Anna Triningsih, Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Negara, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 1 (Maret 2016).

Fauzi Iswahyudi, Keikutsertaan Perancang Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, *Jurnal De Lega Lata*, Volume 1, Nomor 1 (Januari 2016).

Hamdan Zoelva, Constitutional Complaint dan Constitutional Question Dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, *Jurnal Media Hukum*, Volume 19, Nomor 1 (Juni 2012).

Iskatrinah, Politik Hukum Pemekaran Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Jurnal De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 1 (Januari 2017).

Iwan Satriawan dan Andi Saputra, Faktor-Faktor Kemenangan Calon Incumbent Dalam Pilkada, *Jurnal Konstitusi*, Volume 3, Nomor 1 (Juni 2010).

Riri Nazriyah, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 17, Nomor 3 (Juni 2010).

Septi Nur Wijayanti, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, *Jurnal Media Hukum*, Volume 23, Nomor 2 (Desember 2016).

Wasisto Raharjo Jati, Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah Di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 4 (Desember 2012).

Yogi Zul Fadhli, Inkonstitusionalitas Pasal 19 Perma Nomor 2 Tahun 2016 dan Implikasinya terhadap Akses Keadilan Warga Negara, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 4 (Desember 2016).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah.

Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949.

Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950.

Penetapan Pemerintah Nomor 16/SD Tahun 1946 tentang Pemerintah Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 .

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.

Internet

Julianto Ibrahim, Keberadaan Daerah Istimewa Surakarta: Kajian Histotis, bppsdis.wordpress.com, diunduh pada Rabu, 12 Desember 2018, pukul 11.14 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kbbi.web.id, diunduh pada Rabu, 12 Desember 2018 pukul 11.00 WIB.